



# Laporan Bulanan

Badan Pengarah Papua

**JULI 2025**

Laporan Operasional & Kegiatan

**Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua**

**Provinsi Papua Barat Daya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penyusunan Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan laporan operasional dan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Juli 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, realisasi dan kinerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sorong, 11 Agustus 2025

Anggota BP3OKP

Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,



Drs. Otto Ihalauw, MA

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Maksud & Tujuan .....	4
1.2 Ringkasan Kelembagaan .....	4
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	4
1.2.2 Definisi .....	5
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	5
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya .....	6
1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya .....	7
BAB II KEGIATAN DAN CAPAIAN .....	8
1. Rekapitulasi Kegiatan .....	8
2. Capaian .....	67
BAB III PENUTUP .....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud & Tujuan**

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai laporan rutin yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP), Kepala Sekretariat BPP Provinsi Jayapura (selaku koordinator Sekretariat BPP), serta Kepala Sekretariat BPP Sorong (KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya).

Tujuan dari disusunnya laporan ini antara lain :

- 1) Sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Juli 2025.
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya pada bulan Juli 2025.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan/ atau program kerja, penyelenggaraan dan evaluasi kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya untuk bulan yang akan datang.
- 4) Sebagai laporan operasional Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

#### **1.2 Ringkasan Kelembagaan**

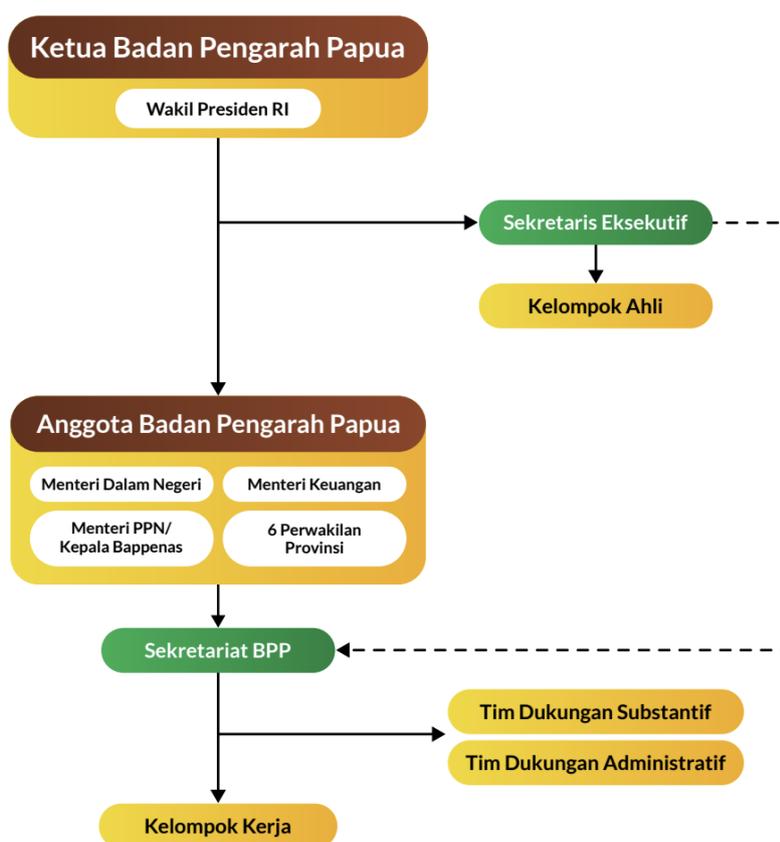
##### **1.2.1 Landasan/Dasar Aturan**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

### 1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### 1.2.3 Struktur Kelembagaan



### 1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
  - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
  - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
  - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
  - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

#### 1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Ringkasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya antara lain :

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya)	1
2	<b>Kelompok Kerja</b>	
	Papua Sehat	1
	Papua Cerdas	1
	Papua Produktif	1
	Papua Polhukam/Damai	1 (Nonaktif)
	Usulan Pokja yang Aktif Terlibat	2
3	KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif	5
4	Staf PPNPN	3
	<b>Jumlah</b>	13

### 1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Jumlah (Unit/Set) / Keterangan
<b>A</b>	<b>Bangunan</b>	1 Unit (Milik GKN Sorong)
<b>B</b>	<b>Ruangan</b>	
	Front Office	1 Unit
	Ruang Rapat	1 Unit
	Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Istirahat Pimpinan/ Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Dapur	1 Unit
	Ruang Kamar Mandi/Toilet	2 Unit
<b>C</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>	
	Meja Kerja	10 Unit
	Kursi Kerja	10 Unit
	Meja Rapat	1 Unit
	Kursi Rapat	9 Unit
	Meja Tamu	1 Unit
	Kursi Tamu	3 Unit
	AC	5 Unit
	Printer	2 Unit
	Laptop	7 Unit
	Sofa Tamu	1 Set
	Smart TV	3 Unit
	Meja dan Kursi Makan	1 Set
	Kulkas	1 Unit
	Kompur Listrik	1 Unit
	Dispenser	2 Unit
	Mesin Kopi	1 Unit
	Jam Dinding	3 Unit
	Kitchen Set	1 Set
	CCTV	4 Unit
	Lemari Arsip	1 Unit
	Lemari Kamar	1 Unit
	Tempat Tidur	1 Unit
	Rak Piring Kecil	2 Unit
	Starlink	1 Unit
	Hardisk	2 Unit
	ATK (Stapler, Gunting, Penggaris, dll)	Tersedia
	Peralatan Makan (Piring, Sendok, dll)	Tersedia

## BAB II

### KEGIATAN DAN CAPAIAN

#### 1. Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Juli tahun 2025, antara lain :

##### 1) Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK dengan BBKSDA & Pemda Se-PBD pada kegiatan Lepas Sambut Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	02 Juli 2025 di Aula Hotel Mariat Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan dari keikutsertaan BPP PBD dalam kegiatan Lepas Sambut Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Daya adalah untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, menyampaikan arahan terkait peran dan fungsi BPP PBD dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi strategis khususnya bagi Kabupaten Tambrau sebagai wilayah konservasi, agar pengelolaan potensi dan perlindungan lingkungan dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); BBKSDA; Gubernur PBD; Pemda PBD; Forkopimda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi RIPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang lebih erat antara BPP PBD, BBKSDA, dan Pemda se-PBD dalam mendukung pengelolaan wilayah konservasi.</li> <li>2. Tersampainya arahan kelembagaan BPP PBD serta rekomendasi strategis kepada Kabupaten Tambrau sebagai wilayah konservasi prioritas.</li> </ol>

	<p>3. Meningkatnya pemahaman dan komitmen bersama untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan RIPP (arah kebijakan pembangunan wilayah Papua), prinsip konservasi dan keberlanjutan.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<p>Perlu peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk membahas review RTRW Provinsi Papua Barat Daya agar selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan, mendukung proses perizinan pinjam pakai kawasan lindung di lima distrik pedalaman Kabupaten Tambrauw, serta memastikan implementasi kebijakan konservasi berjalan secara inklusif. Pemerintah Daerah juga diharapkan bersinergi dengan masyarakat adat, LSM, KSDA, dan pemangku kepentingan terkait, mengawal agar dana emisi karbon dikelola secara transparan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan, serta mendukung penguatan kelembagaan ekonomi lokal sebagai fondasi kesejahteraan berkelanjutan.</p>
<p>Dokumentasi</p>	



## 2) Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Audiensi/Pertemuan dengan Pihak CV. Tambrauw Xpor
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	03 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima aspirasi dan sosialisasi kelembagaan BP3OKP
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Pihak CV. Tambrauw Xpor
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model Bisnis Solutif: CV. Tambrauw Xpor dibangun atas analisis masalah yang mendalam dan menawarkan solusi nyata bagi ekonomi Tambrauw.</li> <li>2. Dampak Ekonomi &amp; Sosial: Berpotensi meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, mendorong hilirisasi, dan menambah PAD.</li> <li>3. Komitmen &amp; Kredibilitas: Tim terbukti mandiri, berhasil memperoleh pendanaan swasta, dan memiliki rekam jejak penjualan nyata.</li> <li>4. Perlu Kolaborasi Strategis: Diperlukan dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui lembaga terkait, termasuk BP3OKP, untuk memperluas skala dan menghadapi tantangan regulasi serta pasar.</li> </ol>

Rekomendasi/Rencana  
Tindaklanjut

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah

1. Fasilitasi Pertemuan dengan Pemda: BP3OKP memfasilitasi pertemuan antara tim Tambrauw Export dengan Bupati Tambrauw yang baru serta SKPD terkait (Perindustrian, Pertanian, Investasi) untuk menyinergikan program dan memperoleh dukungan kebijakan yang lebih kuat.
2. Integrasi ke Dokumen Perencanaan Daerah: Mengkaji peluang memasukkan model bisnis hilirisasi kelapa ke dalam RKPD 2026 guna menjamin dukungan yang lebih terstruktur.
3. Akses Permodalan: BP3OKP menjembatani hubungan CV. Tambrauw Xpor dengan lembaga permodalan khusus OAP, termasuk sumber dana abadi.
4. Pendampingan Regulasi: Memberikan dukungan navigasi regulasi terkait ekspor, perizinan, dan sertifikasi.
5. Penguatan SDM Lokal: Mendorong rekrutmen tenaga kerja asli Tambrauw dalam struktur organisasi untuk memperkuat representasi dan keberlanjutan.
6. Diversifikasi Produk: Mendorong pengembangan usaha baru, seperti produksi briket dari tempurung kelapa, dengan dukungan semua pihak terkait.

Dokumentasi





## 3) Kegiatan 3

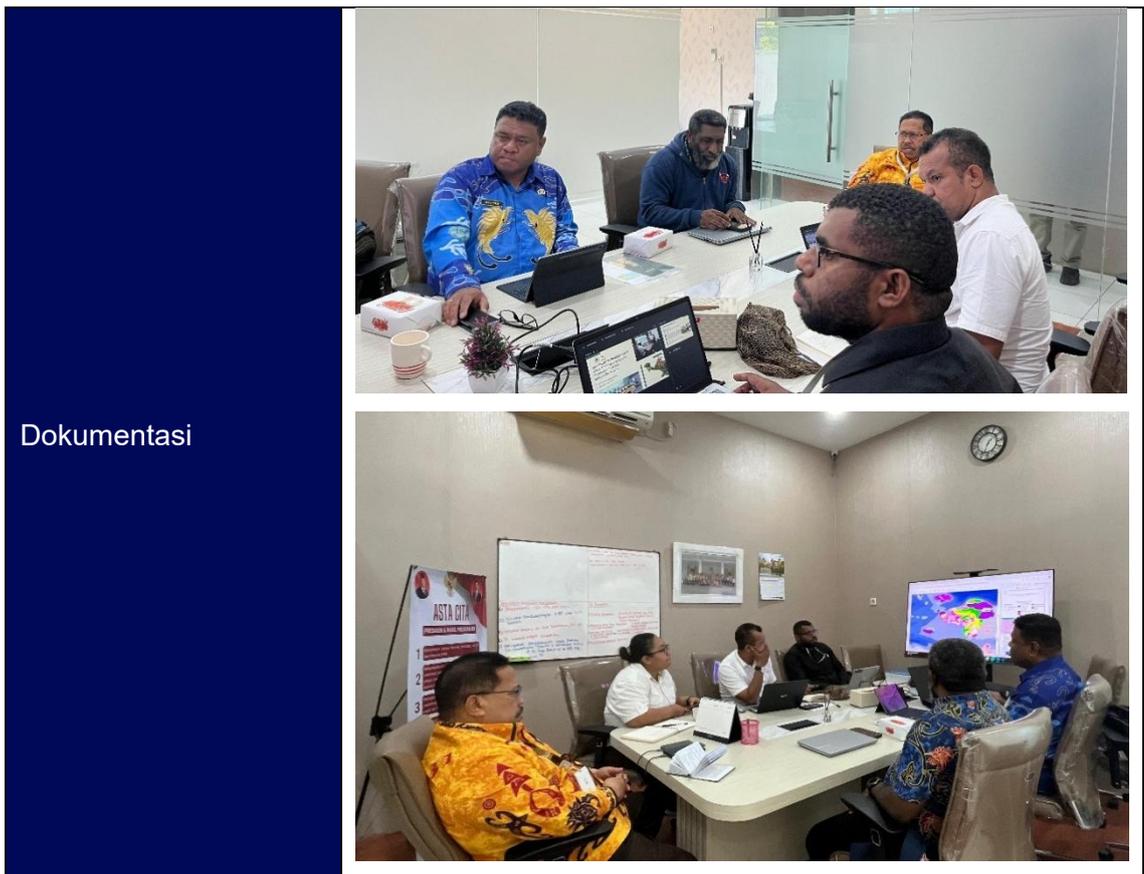
Nama Kegiatan	SHEK dengan Pemerintah Kota Sorong (Walikota dan Tim)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	03 Juli 2025 di Kantor Walikota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan SHEK bersama Pemerintah Kota Sorong adalah untuk memperkuat koordinasi dan klarifikasi terkait status aset daerah milik Kota Sorong, khususnya aset lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan RS Siloam, sehingga pengelolaan aset dapat berjalan transparan, tertib administrasi, serta mendukung optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Walikota & Tim
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasi status dan posisi hukum aset daerah milik Kota Sorong, khususnya lahan bakal bangunan RS Siloam.</li> <li>2. Terbangun kesepahaman antara Pemerintah Kota Sorong dan BPP PBD mengenai langkah koordinasi lebih lanjut dalam penanganan aset.</li> <li>3. Diperoleh komitmen awal untuk menindaklanjuti penyelesaian administrasi aset agar pemanfaatannya dapat segera dioptimalkan.</li> </ol>

<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<p>perlu dilakukan penelaahan lebih detail terhadap dokumen kepemilikan dan status hukum aset, disertai koordinasi lanjutan antara Pemerintah Kota Sorong, BPP PBD, serta instansi terkait guna memastikan kejelasan legalitas. Selain itu, diperlukan langkah percepatan penyelesaian administrasi dan penetapan status aset agar pemanfaatannya, khususnya untuk pembangunan RS Siloam, dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

#### 4) Kegiatan 4

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>SHEK dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>03 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya</p>
<p>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan di Papua Barat Daya, khususnya dalam peninjauan RPJMD dan penyusunan RTRW yang selaras dengan kepentingan masyarakat adat serta arah pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong terbentuknya mekanisme kerja bersama, termasuk tim kecil pembahasan pinjam pakai kawasan hutan lindung, sehingga proses perencanaan, pemanfaatan, dan perlindungan kawasan hutan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.</p>
<p>Peserta Kegiatan</p>	<p>BP3OKP PBD (Anggota &amp; Pokja); Pihak DLHKP PBD</p>

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejak tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur melalui Permenhut No. 41 Tahun 2019 dan UU No. 23 Tahun 2021, yang mengalihkan urusan kehutanan ke tingkat provinsi dan pusat (Kementerian). Dengan demikian, Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengurusan izin kehutanan.</li> <li>2. Holdingszone adalah kawasan hutan yang belum ditentukan peruntukannya. Apabila Pemda Kabupaten/Kota maupun Provinsi ingin memperluas area pembangunan, maka perlu mengajukan perluasan holdingszone. Langkah ini dinilai lebih cepat dibandingkan metode lain yang memerlukan waktu dan sumber daya lebih besar, terutama setelah adanya perubahan nomenklatur sebagaimana disebutkan di atas. Namun, selama ini Pemda masih kurang sigap dalam mengajukan perluasan holdingszone.</li> <li>3. Lebih dari 75% wilayah hutan Kabupaten Tambrauw merupakan kawasan konservasi.</li> </ol>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPP segera melakukan review RPJMD Provinsi, khususnya terkait peta jalan, kawasan hutan masyarakat adat, serta menyinergikan RTRW dengan RPJMD Papua Barat Daya.</li> <li>2. Perlu diselenggarakan rapat bidang antara tim kehutanan, dilanjutkan dengan rapat lengkap bersama seluruh stakeholder dalam rangka penyusunan RTRW.</li> <li>3. Membentuk tim kecil khusus untuk membahas skema pinjam pakai kawasan hutan lindung di Kabupaten Tambrauw dan Sorong Selatan.</li> <li>4. BPP mendorong agar dalam RPJMD Provinsi dimuat program PPSB Kehutanan (ijin pinjam pakai), kemudian dilanjutkan dengan identifikasi potensi PPSB.</li> </ol>



## 5) Kegiatan 5

Nama Kegiatan	SHEK dengan Kepala Bandara DEO Sorong dan Tim
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	03 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin koordinasi langsung dengan pihak Bandara DEO Kelas I Sorong terkait penataan aset dan pengelolaan lingkungan sekitar bandara, khususnya mengenai pemanfaatan gedung serta penanganan selokan di depan area bandara, sehingga Bandara DEO dapat terkelola lebih tertib, bersih, dan menjadi representasi yang baik bagi Kota Sorong dan Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Kepala Bandara DEO Sorong & Tim
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP

<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandara DEO Sorong merupakan wajah depan pemerintah daerah yang perlu ditata dengan baik.</li> <li>2. Terdapat aset gedung milik Provinsi (1 unit) dan Kota Sorong (1 unit) di kawasan Bandara DEO yang hingga kini belum diserahkan.</li> <li>3. Diperlukan kesepakatan terkait pengelolaan selokan air di depan pagar Bandara DEO Sorong yang kondisinya belum tertata dengan baik.</li> </ol>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<p>Perlu difasilitasi pertemuan antara Wali Kota Sorong dan Gubernur Papua Barat Daya dengan Kepala Bandara DEO Kelas I Sorong untuk membahas penyerahan 1 (satu) gedung milik Pemerintah Kota Sorong serta memastikan pengelolaan sampah di selokan depan Bandara DEO Sorong.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

## 6) Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja Ketua Komisi II DPR RI di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	04 Juli 2025 di Hotel Aston Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Kunjungan Kerja Ketua Komisi II DPR RI di Provinsi Papua Barat Daya sebagai forum koordinasi dan komunikasi strategis.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Ketua Komisi II DPR RI; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	Hasil dari kegiatan ini adalah terjalinnya dialog dan komunikasi antara Ketua Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta pemangku kepentingan terkait, termasuk BPP PBD, yang menghasilkan pemahaman bersama mengenai isu strategis pembangunan daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BPP PBD akan menjadwalkan pertemuan dengan Komisi II DPR RI untuk melakukan koordinasi lebih lanjut, guna memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang relevan bagi Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

## 7) Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kegiatan Penutupan Rapat Kerja Pimpinan Yayasan dan Pimpinan PT Wilayah XIV
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	04 Juli 2025 di Hotel Vega Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghadiri Kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sekaligus mengikuti Penutupan Rapat Kerja Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Wilayah XIV sebagai bentuk dukungan, koordinasi, dan penguatan sinergi dalam pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Penyampaian usulan pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Papua Barat Daya oleh LLDIKTI kepada Menteri Pendidikan Tinggi.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu segera disusun naskah akademik sebagai dasar pendirian PTN di Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

## 8) Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025
---------------	--

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	07-09 Juli 2025 di Hotel Horison Ultima Jayapura
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong terciptanya komitmen bersama Dinas Pendidikan se-Tanah Papua dalam melaksanakan Program Prioritas Kemendikdasmen.
Peserta Kegiatan	BP3OKP Se-Tanah Papua; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Gubernur Papua; BPMP Papua; Pemda Papua; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya materi korelasi antara program prioritas dengan RIPPP.</li> <li>2. Program prioritas telah dipresentasikan dan mendapat komitmen dari setiap Kadis melalui berita acara dan fakta integritas.</li> <li>3. Tersusunnya dokumen hasil sidang komisi yang memuat identifikasi masalah pendidikan di Tanah Papua beserta rekomendasinya.</li> </ol>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil rekomendasi dari Sidang Komisi perlu ditindaklanjuti kepada Panitia Pelaksana dan/atau Kemendikdasmen RI.</li> <li>2. Hasil korelasi Program Prioritas Kemendikdasmen RI dengan RIPPP perlu disampaikan kepada seluruh OPD Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan.</li> </ol>
Dokumentasi	



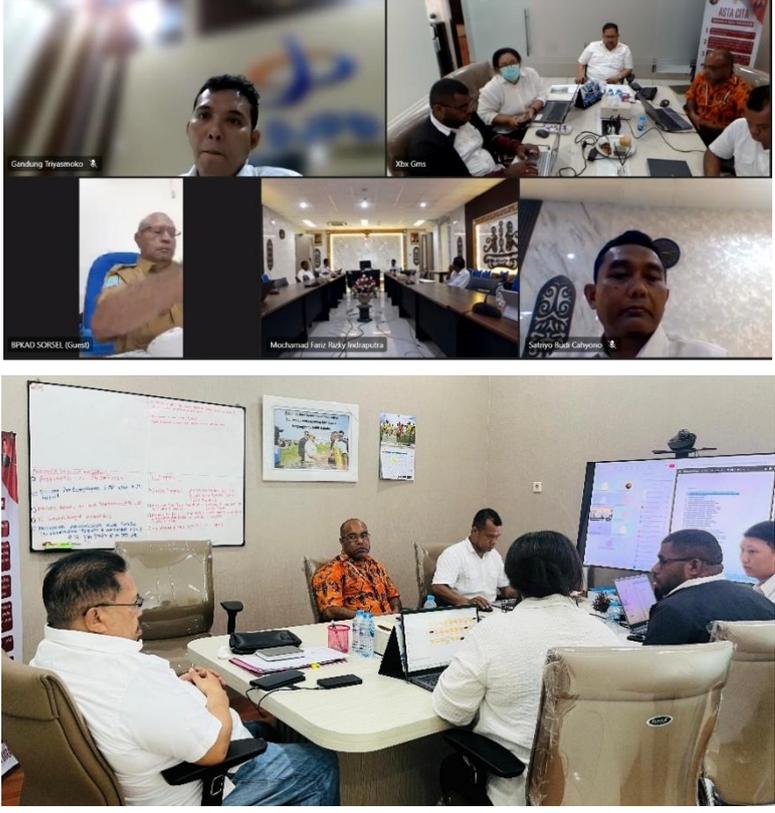
## 9) Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Rapat Virtual (Zoom Meeting) bersama Staf Khusus Wakil Presiden RI & Tim UGM - Sifat Nonformal
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	11 Juli 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan koordinasi nonformal melalui rapat virtual bersama Staf Khusus Wakil Presiden RI dan Tim UGM, sebagai upaya memperkuat komunikasi serta menyelaraskan langkah kerja dengan Setwapres RI.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Staf Khusus Wapres RI; Tim UGM
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP
Hasil Kegiatan	Tim Stafsus telah memperoleh informasi secara detail terkait kelembagaan BPP, kinerja BPP, capaian BPP, isu

	strategis Papua Barat Daya, dan Tim Pokja BPP PBD menyatakan kesiapan untuk menyampaikan data secara tertulis apabila diperlukan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stafsus melaporkan kegiatan ini kepada Wakil Presiden selaku Ketua BPP.</li> <li>2. Direncanakan tindak lanjut pertemuan bersama SE dan BPP se-Tanah Papua sebelum pertemuan dengan Ketua (Wakil Presiden).</li> </ol>
Dokumentasi	 

## 10) Kegiatan 10

Nama Kegiatan	FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik Sekaligus dan Tahap I TA 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	14 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas percepatan penyaluran DAK Fisik sekaligus dan tahap I TA 2025 yang

	<p>diselenggarakan oleh DJPb Papua Barat, dimana BPP PBD diundang untuk berperan (SHEK) kepada pemerintah daerah di PBD agar tidak terlambat dalam menyampaikan dokumen persyaratan salur TKD.</p>
<p>Peserta Kegiatan</p>	<p>BP3OKP PBD (Anggota &amp; Pokja); Kanwil DJPb Papua Barat; KPPN Se-PB &amp; PBD; BPKAD Se-PB &amp; PBD; Inspektorat Se-PB &amp; PBD</p>
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>BP3OKP &amp; RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>Terbangunnya pengingat dan penekanan kepada pemerintah daerah agar lebih disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi persyaratan salur DAK Fisik.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<p>Perlu disusun kalender TKD yang diberikan kepada BPP sebagai acuan dalam memantau proses penyaluran dana transfer ke daerah.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

## 11) Kegiatan 11

Nama Kegiatan	Pertemuan BP3OKP PBD dengan Bupati Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 Juli 2025 di Pendopo Kediaman Bupati Kabupaten Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjalankan fungsi SHEK terhadap Pemerintah Kabupaten Sorong, termasuk menindaklanjuti permasalahan aset terkait sertifikat bekas gedung pertemuan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan RS Siloam, serta melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka SHEK bersama Pemerintah Kabupaten Sorong.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Bupati Kabupaten Sorong & Tim
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pertemuan berjalan dengan baik, Bupati Sorong menyambut positif hal-hal yang disampaikan oleh BPP/BP3OKP PBD dan berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dalam setiap kegiatan pembangunan serta program strategis bersama.</li> <li>2. Status aset akan segera diperjelas oleh BPKAD Kabupaten Sorong.</li> <li>3. Pemkab Sorong menyambut baik kehadiran BP3OKP PBD dan memerintahkan OPD untuk melaksanakan koordinasi serta konsultasi dengan lembaga ini sebagai mitra pembangunan dalam rangka percepatan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif yang didukung kondisi harmoni sosial.</li> <li>4. Permendikdasmen No. 01 Tahun 2025 tentang redistribusi tenaga guru ke sekolah swasta masih terkendala data Dapodik dan juknis pelaksanaannya.</li> <li>5. Sertifikat lahan RS Siloam sementara masih berada di pihak Kabupaten Sorong, sedangkan yang diserahkan pada tahun 2018 hanya berupa berita acara.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kebijakan mandatory spending pada TKD menyulitkan Bupati untuk menjalankan program prioritas sesuai visi misinya.</li> <li>7. Persoalan batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan daerah tetangga telah selesai, hanya menyisakan tapal batas dengan Sorong Selatan di Kampung Botain. Seluruh aset yang diserahkan ke Kota Sorong sudah dituntaskan.</li> <li>8. Dokumen RPJMD Kabupaten Sorong saat ini masih dalam tahap Rancangan Awal (Ranwal).</li> <li>9. Persoalan utama di Kabupaten Sorong adalah keterbatasan infrastruktur konektivitas (jalan &amp; jembatan), jaringan listrik, dan telekomunikasi. Untuk telekomunikasi, Pemkab berupaya menyediakan layanan Starlink di distrik terluar yang sulit akses.</li> <li>10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang telah diresmikan sejak 2019 belum berjalan optimal karena faktor pandemi Covid-19, tidak adanya dukungan pemerintah pusat dalam penempatan proyek smelter, keluarnya investor akibat ketidakjelasan aktivitas ekonomi, lemahnya kinerja Dewan Kawasan, serta pembangunan pelabuhan yang terkendala faktor alam.</li> <li>11. Program Sekolah Rakyat dari Kemensos belum berjalan karena juknis belum tersedia, ditambah persoalan lahan yang menjadi hambatan.</li> <li>12. Program Quick Win Layanan Pemeriksaan Kesehatan gratis masih terkendala akses pasien dalam sistem layanan akibat keterbatasan jaringan serta sarana handphone/laptop.</li> </ol>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segera dilakukan pemeriksaan dokumen aset di BPKAD Kabupaten Sorong dan hasilnya akan disampaikan kepada BPP.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait penyusunan dokumen RPJMD, Renstra, serta implementasi Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru.</li> </ol>

3. BPP mendorong Kemendikbud untuk segera menyelesaikan juknis terkait penempatan guru melalui Dapodik sesuai Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025.
4. Mendorong penyerahan sertifikat tanah RS Siloam kepada Pemkot Sorong agar pembangunan dapat segera dilanjutkan oleh pihak RS Siloam.
5. Mengusulkan fleksibilitas dalam penggunaan TKD agar dapat mendukung program prioritas daerah.
6. BPP bersama Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Sorong melakukan review terhadap Ranwal RPJMD.
7. Menindaklanjuti rencana rapat bersama Gubernur terkait percepatan pengembangan KEK Sorong.
8. Mempercepat penyusunan juknis penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, serta mendorong Pemprov membangun satu Sekolah Rakyat sebagai pilot project.
9. Meningkatkan layanan dasar, khususnya akses konektivitas, jaringan telekomunikasi, dan listrik di wilayah Kabupaten Sorong.



Dokumentasi

## 12) Kegiatan 12

Nama Kegiatan	Pertemuan BP3OKP PBD dengan Rektor Unimuda
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	16 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin koordinasi antara BP3OKP PBD dan Rektor Unimuda, khususnya dalam menindaklanjuti permohonan dukungan terkait rencana pembangunan RS Muhammadiyah di Kabupaten Sorong agar dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Sehat); Rektor Unimuda & Tim
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Unimuda menyampaikan permohonan dukungan terkait pembangunan RS Muhammadiyah di Kabupaten Sorong.</li> <li>2. BP3OKP PBD menerima masukan tersebut dan siap menindaklanjuti dalam kerangka koordinasi lintas sektor.</li> <li>3. Pokja Sehat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya pada bidang Pelayanan Kesehatan dan Perencanaan, untuk memastikan kemungkinan pemberian bantuan hibah pemenuhan alat kesehatan bagi rumah sakit swasta.</li> </ol>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja Sehat akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.</li> <li>2. Pihak RS Muhammadiyah diharapkan proaktif memanfaatkan berbagai peluang untuk memperoleh dukungan alat kesehatan, termasuk melalui kerja sama operasional (KSO) dengan bidang terkait.</li> </ol>



Dokumentasi

## 13) Kegiatan 13

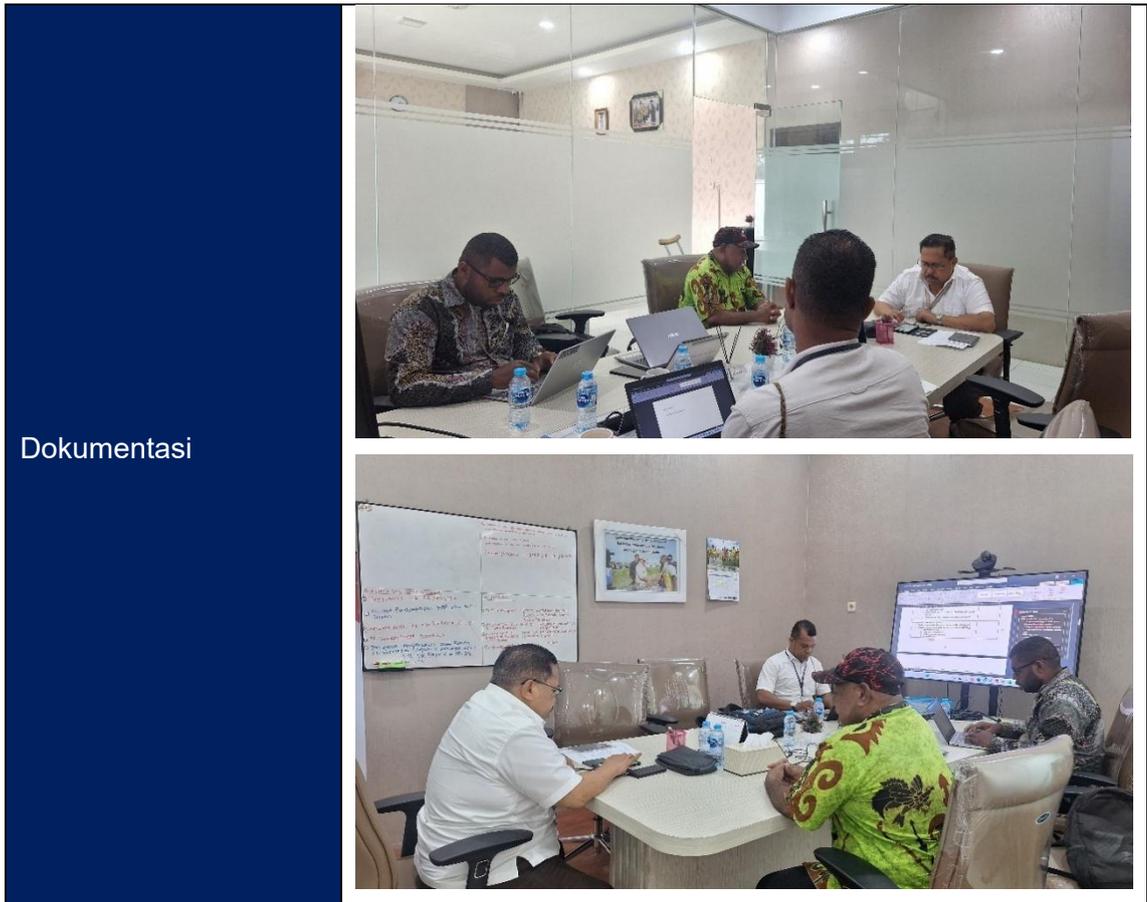
Nama Kegiatan	Diskusi terkait PKN STAN Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	16 Juli 2025 di Ruang Rapat Kasuari Kanwil DJBC Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk diskusi bersama Kanwil DJBC Papua Barat terkait informasi sistem penerimaan PKN STAN Tahun 2025.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja); Tim Kanwil DJBC Papua Barat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Kegiatan ini melaksanakan fungsi koordinasi terkait informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN. Dari hasil diskusi diperoleh penjelasan bahwa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung

	<p>jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sistem penerimaan mahasiswa baru dibagi ke dalam tiga jalur, yaitu jalur reguler dengan kuota terbesar dan bersaing secara nasional, jalur afirmasi untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta jalur pembibitan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Saat ini PKN STAN hanya menyelenggarakan program studi Diploma IV (D4), dan lulusannya dapat ditempatkan baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun di instansi pemerintah daerah.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan upaya sinergitas program bersama Pemda Provinsi dalam rangka perencanaan jangka panjang serta pengembangan SDM dan tata kelola keuangan.</li> <li>2. Sosialisasi PKN STAN akan dilakukan secara kontinu mengingat sedikitnya peminat akibat kurangnya sosialisasi.</li> <li>3. Akan dilakukan kerja sama antara Kanwil Bea Cukai Sorong dan Pemprov Papua Barat Daya terkait penambahan kuota jalur penerimaan Afirmasi dan Pembibitan.</li> </ol>
<p>Dokumentasi</p>	



## 14) Kegiatan 14

<b>Nama Kegiatan</b>	Audiensi dengan Pemilik Hak Ulayat Bandara Teminabuan (Maikel Kareth)
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	16 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	Tujuan kegiatan ini adalah menerima permohonan pertemuan dari Pemilik Hak Ulayat Bandara Teminabuan, yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait permasalahan hak ulayat.
<b>Peserta Kegiatan</b>	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Maikel Kareth
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	BP3OKP & Polhukam/Damai
<b>Hasil Kegiatan</b>	Terdapat dua persoalan yang perlu diselesaikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian pembayaran Hak Ulayat yang masuk ke areal Bandara Teminabuan.</li> <li>2. Pembuatan jalan akses bagi masyarakat yang tinggal di seberang Bandara Teminabuan.</li> </ol>
<b>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengagendakan pertemuan tindak lanjut dengan Pihak Bandara Teminabuan dan Pihak Bandara Inanwatan dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian tanah ulayat yang digunakan sebagai areal bandara.</li> <li>2. Mengagendakan pertemuan tindak lanjut dengan Bupati Sorong Selatan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan jalan bagi warga yang tinggal di sebelah Bandara DEO.</li> </ol>



## 15) Kegiatan 15

Nama Kegiatan	SHEK dengan BPKP Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 Juli 2025 di Kantor BPKP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah melakukan sinkronisasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mengenai outline proses review dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sekaligus melaksanakan fungsi koordinasi bersama mitra strategis.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Tim BPKP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi & Sinkronisasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Kesepakatan mengenai perencanaan yang baik akan menentukan penganggaran yang baik dan seluruh proses selanjutnya. Kegiatan ini melaksanakan fungsi

	<p>koordinasi bersama mitra strategis perencanaan dan evaluator internal, yakni BPKP Papua Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan Provinsi, masih banyak pihak di tingkat pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya yang belum memahami regulasi terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paradigma baru dalam RIPP dan RPJMN sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025;</li> <li>b. belum adanya kejelasan terkait PPSB.</li> </ol> </li> <li>3. Penyusunan program daerah (dalam RPJMD) banyak yang tidak dilakukan dengan sistematika yang baik dan benar, sehingga output dan outcome tidak dapat terukur dengan optimal.</li> </ol>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu melakukan SHEK oleh BP3OKP bersama pimpinan Bapeda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Inspektorat/APIP terkait penyusunan RPJMD yang baik dan benar, sehingga kekurangan dalam RIPP, RPJMN, PPSB, serta “money by program” dapat diakomodasi.</li> <li>2. Perlu menetapkan timeline perencanaan evaluasi triwulan dan/atau monev pelaksanaan kegiatan Tahap I Pencairan Otsus, serta mendorong pendampingan cascading kepada OPD teknis agar perencanaan dan capaian sasarnya tepat.</li> <li>3. BPP dan BPKP secara rutin melakukan koordinasi terkait perencanaan pembangunan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.</li> </ol>
<p>Dokumentasi</p>	



## 16) Kegiatan 16

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk berkoordinasi terkait rencana kegiatan Seminar Forum Komunikasi Fakultas Pertanian di Seluruh Indonesia (Nasional) yang akan di adakan pada bulan Oktober 2025 di Sorong, dengan UNIPA sebagai tuan rumah.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	Seminar Forum Komunikasi Fakultas Pertanian Seluruh Indonesia (Nasional) akan diadakan pada bulan Oktober 2025 di Sorong, dengan Universitas Papua (UNIPA) sebagai tuan rumah. Dalam rangka menyukseskan acara tersebut, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Provinsi Papua Barat Daya. UNIPA memerlukan dukungan dari BP3OKP PBD untuk menjembatani koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga bantuan, fasilitas, dan partisipasi pemda dapat terwujud. Kegiatan ini akan mencakup seminar serta pameran hasil pertanian dari para petani OAP.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Akan dilakukan audiensi oleh pihak panitia kegiatan bersama Bupati Kabupaten Sorong dan Kadis Pertanian Kabupaten Sorong, yang difasilitasi oleh Kadis Sosial Kabupaten Sorong, terkait rencana kegiatan dan permohonan dukungan untuk kelancaran acara nanti.
Dokumentasi	

## 17) Kegiatan 17

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan DLHKP Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	18 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah melakukan kordinasi teknis terkait regulasi dan perizinan dalam rangka mendukung rencana pembangunan jalan untuk membuka akses dan layanan pada 5 distrik terisolir di kawasan konservasi dan hutan lindung Kabupaten Tambrauw.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Tim DLHKP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah konservasi Kabupaten Tambrauw dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama yang tidak dapat dielakan. Mekanisme ini dapat dilakukan karena berpengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, sarana komunikasi, transportasi terbatas, dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.</li> </ol>

	2. Pemerintah Daerah melalui Bupati berkewajiban membentuk tim teknis lintas OPD guna menyiapkan dokumen kerjasama dan dokumen permohonan PPKH untuk mempercepat proses penggunaan kawasan hutan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP perlu melaksanakan Forum SHEK lintas lembaga dan OPD dalam rangka pembangunan jalan mencakup 5 distrik prioritas (1. Distrik Kwesefo; 2. Distrik Tinggouw; 3. Distrik Ileres; 4. Distrik Manekar; dan 5. Distrik Tobouw) Kabupaten Tambrau.
Dokumentasi	

## 18) Kegiatan 18

Nama Kegiatan	Evaluasi Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	18 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan koordinasi terkait program dan kegiatan Anggota BP3OKP maupun anggota Pokja BP3OKP, sekaligus memperkuat peran Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya sebagai penggerak administrasi dan substantif bagi Pokja. Kegiatan ini mencakup evaluasi bersama KPPN Sorong guna menilai dukungan administrasi, sistem keuangan, serta pendampingan teknis yang relevan, sekaligus melaksanakan koordinasi dan evaluasi serapan pendanaan

	BP3OKP dan Pokja periode Januari–Juli 2025, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan Otonomi Khusus Papua dapat terwujud.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Tim Dukungan Sekretariat BP3OKP PBD (KPPN Sorong)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa hal yang menjadi evaluasi pada pertemuan akan dibicarakan kembali karena terkait dengan kewenangan Kantor Sekretariat BPP.</li> <li>2. Anggaran anggota BPP sepenuhnya dikelola oleh Tim Sekretariat Kanwil Papua.</li> <li>3. Rata-rata serapan anggaran tiap Pokja (Sehat, Cerdas, dan Produktif) periode Januari–Juli 2025 adalah 27–28%, sedangkan untuk Pokja Polhukam belum mencapai 1%.</li> <li>4. Anggaran Pokja Polhukam dapat digunakan/diajukan dengan persetujuan anggota BPP.</li> <li>5. Percepatan serapan anggaran dilakukan melalui perencanaan kegiatan tiap Pokja dengan menyampaikan usulan kegiatan 4–7 hari sebelumnya.</li> <li>6. Terbangun kesepahaman antara Sekretariat BP3OKP dan KPPN Sorong mengenai peran dan dukungan administrasi.</li> <li>7. Disepakati mekanisme komunikasi dan koordinasi berkala untuk mempercepat layanan dukungan bagi Pokja.</li> </ol>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunggu hasil evaluasi lebih lanjut sebelum menetapkan langkah selanjutnya.</li> <li>2. Pertemuan evaluasi seperti ini perlu dilaksanakan setiap bulan untuk mengurangi minimnya serapan anggaran Pokja.</li> <li>3. Kegiatan evaluasi dijadikan landasan yang kuat bagi peningkatan dukungan administratif dan substantif bagi anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>

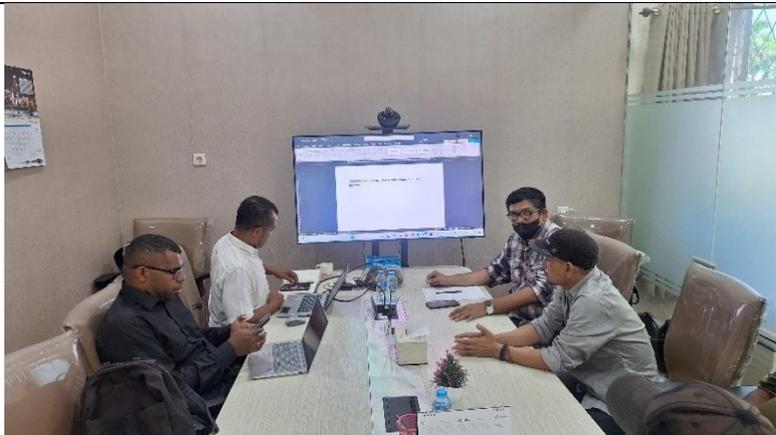
	4. Peran koordinasi antara KPPN Sorong dan BP3OKP perlu ditingkatkan untuk memperkuat fungsi BP3OKP dalam pelaksanaan tugas di tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	
	

## 19) Kegiatan 19

Nama Kegiatan	Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI (Serentak secara Hybrid)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	21 Juli 2025 di Halaman Kantor Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah menghadiri undangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya untuk terlibat dalam kegiatan dimaksud.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Forkopimda PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)

<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>Gubernur Papua Barat Daya melaporkan bahwa sebanyak 80% Koperasi Merah Putih telah disiapkan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Bisnis bagi Pengelola Koperasi Merah Putih Memberikan pelatihan mengenai skema dan tata cara bisnis yang baik, karena modal kerja diberikan oleh bank dengan skema bisnis dan APBDes sebagai jaminan.</li> <li>2. Pengembangan Pasar dan Industri Penampung Produk Unggulan Produk unggulan Koperasi Merah Putih perlu mendapatkan pasaran melalui pengembangan industri menengah untuk menampung hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.</li> <li>3. Sinergi dengan Program Unggulan Lainnya Menjalin harmoni dan sinergi dengan berbagai program unggulan Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis, sehingga produk Koperasi Merah Putih memiliki pasar dan mendukung keberlanjutan kegiatan.</li> </ol>
<p>Dokumentasi</p>	

## 20) Kegiatan 20

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan DPP MPG
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	21 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan dari kegiatan ini adalah koordinasi dan sharing terkait progres implementasi kebijakan pembangunan 3 juta rumah di Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Produktif); Tim DPP MPG PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	BP3OKP dan Tim MPG akan terus melaksanakan kordinasi untuk mendorong pembangunan 3 juta rumah di Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu kordinasi pada tingkat kementerian (Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri) untuk mengupdate progres kebijakan dan program 3 juta rumah.
Dokumentasi	

## 21) Kegiatan 21

Nama Kegiatan	Pembekalan Pokja terkait Monev Laporan Otsus
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya (Zoom Meeting)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP, khususnya terkait analisa Monitoring dan Evaluasi (Monev)

	<p>Laporan Otonomi Khusus (Otsus), maka perlu dilakukan kegiatan Pembekalan Teknis.</p> <p>Pembekalan teknis relevan untuk memastikan anggota Pokja BP3OKP memahami konsep dasar, metodologi, dan instrumen Monev. Hal ini penting karena pengawasan implementasi Otsus membutuhkan keahlian analisis data, interpretasi capaian indikator, serta penilaian efektivitas program.</p>
Peserta Kegiatan	BP3OKP (Anggota & Pokja); Kanwil DJPb Papua dan Papua Barat; DJPK
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang dan Pemahaman Pokja Anggota Pokja BP3OKP memiliki latar belakang yang beragam. Pemahaman anggota terhadap konsep Monev Otsus perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua.</li> <li>2. Instrumen Monev Diperlukan instrumen Monev yang lebih operasional sebagai acuan bagi setiap Pokja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> <li>3. Rencana dan Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAP merupakan persyaratan mutlak terkait penyaluran Otsus.</li> <li>• Laporan pertanggungjawaban dan RAP wajib disampaikan kepada BPP.</li> </ul> </li> <li>4. Koordinasi Antar Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPP diharapkan mampu menerbitkan keputusan bersama enam provinsi.</li> <li>• Dalam perencanaan yang bersumber dari dana Otsus, perlu memperhatikan negatif list.</li> </ul> </li> <li>5. Fungsi Harmonisasi Melaksanakan fungsi harmonisasi, yaitu peningkatan dan/atau pendampingan tata kelola Otsus bagi anggota</li> </ol>

	<p>Pokja untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (Tusi) SHEK.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim substantif sebaiknya menyusun SOP pelaksanaan review dengan target dan capaian yang jelas dalam melakukan review Laporan Otsus, untuk menghindari unsur subjektivitas.</li> <li>2. Melaksanakan pembekalan lanjutan secara berkala guna mendukung kesinambungan kapasitas Pokja.</li> <li>3. Memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait, misalnya perguruan tinggi dan lembaga riset, dalam analisis laporan Otsus.</li> <li>4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan dan dashboard Monev Otsus.</li> <li>5. BP3OKP mengawal agar hasil analisis Monev dapat menjadi bahan masukan bagi kebijakan Presiden dan Pemerintah Daerah.</li> </ol>
<p>Dokumentasi</p>	

## 22) Kegiatan 22

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Gerakan Rumanona
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi terkait program peningkatan kesehatan perorangan bagi remaja putri serta memberikan peluang keterlibatan pemuda dan remaja dalam pembangunan di era Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Founder Gerakan Rumanona
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Rumanona merupakan kegiatan inisiatif yang sangat menginspirasi bagi generasi muda lainnya.</li> <li>2. Anggota BPP PBD memberikan dukungan sertifikat kepada pelopor dan remaja putri yang terlibat dalam kegiatan perdana Gerakan Rumanona.</li> </ol>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Penyerahan dukungan sertifikat akan dilaksanakan di kemudian hari.
Dokumentasi	

## 23) Kegiatan 23

Nama Kegiatan	FORUM SHEK - Rapat Koordinasi terkait Penggunaan Kawasan Hutan di Areal Konservasi Kabupaten Tambrau
---------------	--

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	24 Juli 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Bupati Kabupaten Tambrau; BBKSDA PBD; ASRI; DLHKP PBD; Bappeda Tambrau; DLH Tambrau; PUPR Tambrau; Dinas Kesehatan Tambrau; Ketua DPRD Tambrau
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Multipihak Forum SHEK menjadi wadah koordinasi antara BP3OKP, pemerintah daerah, BBKSDA, DLHK, PUPR, Bappeda, DPRD, KPPN, dan organisasi masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan jalan berkelanjutan di wilayah terisolasi Kabupaten Tambrau.</li> <li>2. Pemaparan Masterplan dan Kondisi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati Kabupaten Tambrau memaparkan Masterplan Pembangunan Jalan dan kondisi nyata di lapangan, khususnya di lima distrik prioritas: Kwesefo, Tinggouw, Ileres, dan Tobouw.</li> <li>• Kepala BBKSDA dan DLHK memberikan arahan terkait ketentuan teknis dan pendekatan berbasis lingkungan dalam pembangunan di kawasan konservasi.</li> </ul> </li> <li>3. Integrasi dengan Kebijakan Nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan anggota BP3OKP memastikan pembangunan jalan selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Perpres 24/2023.</li> <li>• Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) berbagi praktik kolaboratif pelestarian berbasis masyarakat sebagai referensi pembangunan berkelanjutan.</li> </ul> </li> <li>4. Kesepakatan dan Dokumen Pendukung</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangun komitmen pemerintah daerah dan stakeholder dalam mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi.</li> <li>• Disepakati Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Pembangunan Jalan, termasuk tahapan persiapan, prioritas pembangunan, serta pendekatan konservatif dan mitigatif.</li> <li>• Dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama mengenai izin prinsip, dukungan anggaran, dan tata kelola kawasan konservasi.</li> <li>• Disiapkan dokumen dan rekomendasi teknis dari Pemda, DLHK, BBKSDA, dan instansi teknis lainnya terkait kelayakan pembangunan jalan.</li> </ul>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dan Evaluasi Berkala BP3OKP bersama Pemda Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan roadmap pembangunan jalan.</li> <li>2. Koordinasi Teknis Lintas Instansi Memperkuat koordinasi antara Pemda, BBKSDA, DLHK, PUPR, dan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan konservasi dan kelayakan teknis pembangunan.</li> <li>3. Dokumentasi dan Pendampingan Kebijakan BP3OKP mengawal penyusunan dokumen teknis, berita acara, dan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan dukungan anggaran.</li> <li>4. Pendekatan Berkelanjutan Mengintegrasikan praktik kolaboratif pelestarian berbasis masyarakat dan mitigasi lingkungan dalam setiap tahap pembangunan jalan, sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.</li> </ol>

Dokumentasi



## 24) Kegiatan 24

Nama Kegiatan	Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	24 Juli 2025 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Maybrat, Rencana Strategis (Renstra) OPD teknis, RPJMD dengan RIPPSP sehingga perencanaan dan pelaksanaan program OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan Papua (RIPPSP).
Peserta Kegiatan	Pokja Cerdas; Pemda Maybrat; Tim UNIPA; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPSP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangun koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra, termasuk pembahasan prioritas pembangunan dan program unggulan.</li> <li>2. Teranalisisnya isi substansi Dokrenda Kabupaten Maybrat.</li> </ol>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi Dokumen dan Sinkronisasi Melanjutkan finalisasi RPJMD 2025–2029 dan Renstra OPD dengan menyesuaikan arahan RIPPSP, agar dokumen menjadi pedoman resmi pelaksanaan program.</li> <li>2. Koordinasi dan Komunikasi Berkala Menyelenggarakan koordinasi lintas OPD dan stakeholder secara berkala untuk menjaga keselarasan program, target, dan indikator kinerja.</li> <li>3. Pendampingan Teknis OPD Memberikan pendampingan teknis bagi OPD dalam menyusun rencana kerja, penganggaran, dan implementasi program agar sesuai visi-misi kepala daerah dan prioritas RIPPSP.</li> </ol>

	<p>4. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program OPD untuk memastikan pencapaian sasaran RPJMD dan integrasi dengan RIPPP.</p>
Dokumentasi	

## 25) Kegiatan 25

Nama Kegiatan	Penyerahan Dukungan terhadap Gerakan Rumanona (Dukungan Sertifikat Pelaksanaan Event Perdana)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	24 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan dukungan dan apresiasi kepada para remaja Gerakan Rumanona atas pelaksanaan kegiatan perdananya.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Tim Pengurus Gerakan Rumanona
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	Penyerahan sertifikat berhasil dilakukan. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Anggota BP3OKP PBD kepada Founder Gerakan Rumanona, serta Anggota Pokja Papua Sehat kepada Pengurus Gerakan Rumanona.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Akan dilakukan dukungan atau apresiasi serupa pada kegiatan selanjutnya



## 26) Kegiatan 26

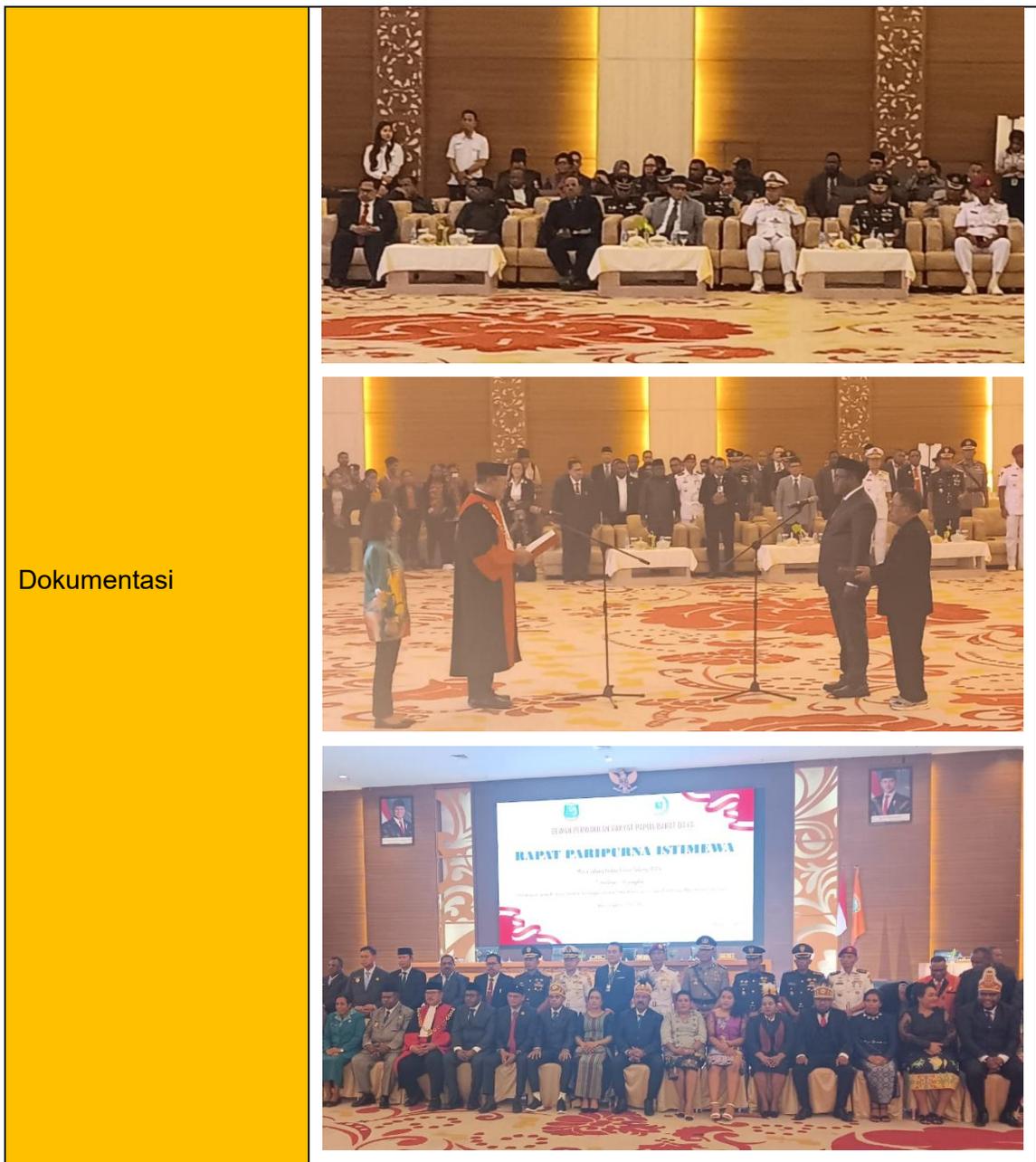
Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	28 Juli 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghadiri undangan kegiatan dimaksud, yang diselenggarakan oleh Pemda Papua Barat Daya dalam rangka mitigasi resiko sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); KPK; Gubernur PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah daerah, melalui Gubernur beserta jajarannya serta para bupati dan wali kota, menyampaikan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi.</li> <li>2. Gubernur menyoroti potensi yang dimiliki Provinsi Papua Barat Daya yang dapat dikelola untuk mendukung pembangunan daerah.</li> <li>3. Pimpinan BP3OKP menekankan bahwa masih banyak RPJMD yang belum disiplin dalam penyusunan dan tidak sepenuhnya taat pada RIPPP maupun RPJMN, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.</li> <li>4. KPK menyoroti masih banyaknya aset daerah yang belum terkelola dengan baik, serta keterbatasan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li> </ol>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap komitmen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Menyelenggarakan Forum SHEK khusus penyusunan RPJMD dengan melibatkan pimpinan Bappeda dan Inspektorat, guna memastikan keselarasan dengan RIPPP dan RPJMN.</li> <li>3. Mendorong adanya pengawalan khusus dari KPK untuk memberikan pembinaan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li> <li>4. Melaksanakan pembinaan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kapasitas dan peran sebagai pengawas internal.</li> <li>5. Membentuk tim khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap berbagai aset daerah, termasuk aset strategis seperti di area Bandara DEO Sorong.</li> </ol>



## 27) Kegiatan 27

Nama Kegiatan	Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat Daya 2024-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	28 Juli 2025 di Hotel Aimas Convention Center
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah menghadiri undangan kegiatan serta membangun sinergitas dan hubungan komunikasi yang baik antara BP3OKP PBD dengan DPR PBD.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Gubernur PBD; Para Bupati/Walikota Se-PBD; Forkopimda PBD; Pemda PBD; DPRD PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-



## 28) Kegiatan 28

Nama Kegiatan	Audiensi dengan UNIPA (Universitas Papua)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	29 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menerima permohonan audiensi dari pihak UNIPA, yang bermaksud untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Forum Komunikasi Fakultas Pertanian di Seluruh Indonesia (FKPTPI).

Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Tim UNIPA
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	Pihak Unipa melalui panitia pelaksana memerlukan dukungan dan kolaborasi dari BP3OKP untuk mensukseskan kegiatan dimaksud.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP Papua Barat Daya akan mendorong dan siap berkolaborasi untuk mendukung kegiatan Seminar Nasional Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia.
Dokumentasi	

## 29) Kegiatan 29

Nama Kegiatan	Diskusi Terbatas Isu-Isu Strategis Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	29 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah menghadiri undangan kegiatan dimaksud, yang diselenggarakan oleh Setwapres dengan

	topik diskusi yaitu isu-isu strategis kebijakan percepatan pembangunan Papua.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Anggota BP3OKP Perwakilan 5 Provinsi lainnya; Deputi III Setwapres & Tim; Stafsus Presiden & Wapres; Lemhanas
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<p>Kesimpulan (Notula):</p> <p>Percepatan pembangunan Papua memerlukan pendekatan yang kontekstual dan berbasis lokal, serta reformasi tata kelola, nomenklatur kelembagaan, dan penguatan peran masyarakat adat. Pembicara mengusulkan perlunya konsolidasi regulasi, distribusi dana Otsus yang tepat sasaran, dan sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan keamanan dan pembangunan juga harus dilakukan secara seimbang, dengan pelibatan tokoh lokal dan pemanfaatan potensi SDM Papua secara maksimal.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<p>Saran (Notula):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah pusat agar memperkuat peran BP3OKP dengan kewenangan eksekusi, bukan hanya koordinasi.</li> <li>2. Segera terbitkan Perpres terkait Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.</li> <li>3. Dorong pendirian sekolah guru OAP berbasis asrama dan budaya lokal.</li> <li>4. Perlu melakukan redistribusi guru dan program relawan terintegrasi dengan jaminan keamanan.</li> <li>1. 5. Evaluasi indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya dari fisik, tetapi juga dari kesejahteraan dan persepsi masyarakat lokal.</li> </ol>



## 30) Kegiatan 30

<b>Nama Kegiatan</b>	Rapat Koordinasi Pendataan Data Orang Asli Papua
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</b>	30 Juli 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	Tujuan kegiatan ini adalah hadir dan terlibat pada rapat koordinasi dimaksud, yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman bersama antar-pemangku kepentingan mengenai mekanisme pendataan OAP yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Peserta Kegiatan</b>	BP3OKP PBD (Pokja); KPK; Gubernur PBD; Pemda PBD; MRP PBD; Tamu undangan lainnya
<b>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</b>	Koordinasi
<b>Misi/Keterangan</b>	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
<b>Hasil Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disepakati bahwa pendataan Orang Asli Papua (OAP) cukup menggunakan tiga kategori saja, karena penambahan kategori keempat berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, baik dari aspek pembangunan maupun politik.</li> <li>2. Teridentifikasi belum optimalnya koordinasi antara Dukcapil Provinsi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dalam proses pendataan OAP.</li> <li>3. Masih terdapat ego sektoral antar-OPD yang menghambat sinkronisasi dan integrasi data OAP.</li> </ol>

	4. Dalam proses pendataan, Dukcapil dipandang perlu melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar hasil yang diperoleh lebih valid, inklusif, dan memiliki legitimasi sosial.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Pendataan OAP secara terpisah sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi lintas lembaga.</li> <li>2. Menyelesaikan penyusunan Draft Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) tentang Pendataan OAP agar memiliki landasan hukum yang kuat dan operasional.</li> </ol>
Dokumentasi	

## 31) Kegiatan 31

Nama Kegiatan	Audiensi BPP dengan KPK
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	30 Juli 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara BPP dan KPK dalam rangka sinkronisasi perencanaan, pengawasan, serta pembinaan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua. Melalui pertemuan ini diharapkan teridentifikasi tantangan implementasi Otsus, terwujud keselarasan perencanaan pembangunan berbasis RIPP dan RAPP, serta tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP Perwakilan 5 Provinsi; Pokja BP3OKP PB, PBD, PT; Kepala Kanwil DJPb PB & Papua + Tim; KPPN Sorong & TIm; Deputi V Korsupgah KPK & Tim; GiZ
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP
Hasil Kegiatan	<p>Kesimpulan Notula:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan optimalisasi sinergi peran serta pelaksanaan tugas dan fungsi BPP dari tingkat ketua hingga anggota, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022;</li> <li>2. Penegasan dan penguatan peran Sekretariat Eksekutif sebagai pendorong koordinasi lintas sektor dan pelaksana teknis strategis;</li> <li>3. Perlunya sinkronisasi antara kementerian/lembaga dalam rangka implementasi Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP dan RAPPP) dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda);</li> <li>4. Peningkatan kolaborasi BPP dengan para mitra strategis dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus serta pembangunan di Tanah Papua;</li> <li>5. Penguatan kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) BPP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta K/L sesuai PP Nomor 107 Tahun 2021 Pasal 40-48 dan Perpres Nomor 121 Tahun 2022.</li> </ol> <p>Hasil Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Peran BPP: Teridentifikasi masih adanya stigma negatif terhadap BPP di beberapa daerah, namun KPK siap menjembatani agar pemerintah daerah memahami fungsi BPP sebagai mitra strategis.</li> <li>2. Permasalahan Dana Otsus: Berbagai kendala muncul, antara lain keterlambatan penyaluran karena syarat</li> </ol>

	<p>salur yang tidak terpenuhi, rendahnya kepatuhan pelaporan, penyimpangan penggunaan anggaran, dan lemahnya pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Paradigma Pembangunan: Banyak pemda masih memandang Otsus sebatas dana, bukan arah kebijakan pembangunan. KPK menekankan perlunya transformasi pola pikir aparat daerah agar lebih fokus pada capaian pembangunan.</li> <li>4. Tata Kelola Aset dan PAD: Aset negara banyak yang tidak terkelola dengan baik, bahkan berpotensi dianggap milik pribadi. Di sisi lain, kemandirian fiskal daerah masih rendah, PAD tidak optimal, dan pemda cenderung bergantung pada dana transfer.</li> <li>5. Sinkronisasi Perencanaan: Masih ada ego sektoral antar-K/L serta belum adanya kewajiban tegas pemanfaatan RIPPP dan RAPPP dalam dokumen perencanaan daerah. KPK mendorong integrasi sistem perencanaan nasional dengan melibatkan BPP.</li> <li>6. Capaian Positif: Beberapa BPP provinsi telah aktif mendorong pemenuhan hak guru, pendirian fakultas kedokteran, penyusunan RPJMD, serta fasilitasi koordinasi lintas sektor di bidang infrastruktur dan lingkungan.</li> <li>7. Arahan KPK: Otsus harus dipandang sebagai kebijakan menyeluruh, bukan sekadar distribusi dana. BPP perlu inovasi, labeling dana Otsus, memperkuat peran Pokja, dan mendorong adanya arahan langsung dari Wakil Presiden untuk memperkuat legitimasi koordinasi.</li> </ol>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kelembagaan BPP: Optimalisasi peran BPP dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk percepatan penetapan Pokja baru agar mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor: Sekretariat Eksekutif BPP perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait (Bappenas, Kemendagri,</li> </ol>

	<p>Kemenkeu) agar implementasi RIPPP dan RAPPP berjalan konsisten.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Percepatan Penyaluran Dana Otsus: Pemda harus disiplin memenuhi syarat salur; KPK dapat dilibatkan sebagai fasilitator untuk mengatasi hambatan teknis dan SDM.</li><li>4. Pengawasan dan Transparansi Keuangan: Mendorong labeling/tagging pada dana Otsus agar capaian lebih terukur dan transparan, serta meningkatkan peran APIP, Inspektorat, dan BPKP.</li><li>5. Transformasi Paradigma Pemda: Perlu penyelenggaraan executive meeting kepala daerah se-Tanah Papua untuk menyamakan pemahaman tentang paradigma pembangunan berbasis RIPPP dan RAPPP.</li><li>6. Penguatan Kapasitas Daerah: Melakukan pembinaan berkelanjutan pada pemda terkait tata kelola aset, peningkatan PAD, dan pemanfaatan sistem interoperabilitas perencanaan.</li><li>7. Sinergi dengan KPK: BPP dapat melaporkan secara informal indikasi penyalahgunaan dana untuk ditindaklanjuti, sekaligus mendukung program KPK di Papua Selatan pada Agustus 2025.</li><li>8. Legitimasi Nasional: Perlu adanya arahan resmi dari Wakil Presiden agar BPP memiliki dasar kuat dalam melibatkan kementerian/lembaga strategis pada agenda percepatan pembangunan di Tanah Papua.</li></ol>
Dokumentasi	



## 32) Kegiatan 32

Nama Kegiatan	Diskusi Internal BPP bersama Kepala Sekretariat BPP Jayapura dan Papua Barat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	30 Juli 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Diskusi internal ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antara BPP dengan Sekretariat BPP Jayapura dan Papua Barat, baik terkait substansi maupun administratif. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan BP3OKP di masing-masing wilayah/provinsi, serta implementasi Perpres Nomor 24 Tahun 2023 dan merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan dan tata kelola BPP di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP Perwakilan 5 Provinsi; Pokja BP3OKP PB, PBD, PT; Kepala Kanwil DJPb PB & Papua + Tim; KPPN Sorong & TIm
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi

Misi/Keterangan	BP3OKP
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya optimalisasi peran, fungsi, dan komunikasi Sekretariat Eksekutif sebagai motor penggerak percepatan pembangunan sesuai amanat Perpres.</li> <li>2. Percepatan pelaksanaan rapat pleno Anggota BPP dengan Ketua/Wakil Presiden.</li> <li>3. Penyusunan desain operasional apabila Sekretariat Eksekutif maupun Ketua BPP akan berkantor di Papua.</li> <li>4. Sinkronisasi peran BPP dengan RIPP dan K/L sebagai bentuk komitmen bersama dalam paradigma baru pembangunan dan Otsus.</li> <li>5. Koordinasi dengan Kemenkeu terkait sinkronisasi sistem keuangan (SIPP–SIKD) dan pemanfaatan selisih dana Otsus.</li> <li>6. Percepatan seleksi anggota Pokja dan penetapan Koordinator Pokja dari K/L sebagaimana amanat Perpres 121/2022.</li> <li>7. Penguatan strategi pendampingan Pokja dalam menjalankan misi pembangunan di kabupaten/kota lokpri.</li> <li>8. Penajaman mekanisme penugasan ASN/TNI/Polri, termasuk kepastian hak keuangan anggota BPP/Pokja.</li> <li>9. Penyelesaian hambatan administratif, seperti perjadin, SOP SHEK, dan mekanisme revolving, yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran di beberapa provinsi.</li> <li>10. Penyediaan ruang diskusi rutin bulanan guna menyelesaikan persoalan administratif dan teknis secara kolektif.</li> </ol>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran Sekretariat Eksekutif dan mempercepat rapat pleno sesuai amanat Perpres.</li> <li>2. Menyusun desain operasional kantor BPP di Papua serta strategi pendampingan Pokja untuk tiga misi utama pembangunan.</li> <li>3. Mempercepat penambahan dan penetapan Koordinator Pokja dari K/L.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan sinkronisasi sistem keuangan dengan Kemenkeu, serta meninjau kembali mekanisme revolving agar tidak menghambat pelaksanaan program.</li> <li>5. Menyelesaikan kejelasan dasar hukum dan hak keuangan anggota BPP/Pokja, dengan analisis bersama K/L teknis.</li> <li>6. Menyediakan SOP SHEK yang lebih jelas dan memperkuat mekanisme pengajuan perjadiin.</li> <li>7. Meningkatkan koordinasi rutin, baik secara daring maupun luring, untuk menyelesaikan hambatan administratif.</li> <li>8. Memperkuat SDM BPP berbasis sistem meritokrasi agar pelaksanaan program lebih berkualitas dan berkelanjutan.</li> </ol>
Dokumentasi	

## 33) Kegiatan 33

Nama Kegiatan	Fasilitasi Pertemuan Kepala Kanwil DJPb Papua Barat dengan Gubernur Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	31 Juli 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi pertemuan antara Kepala Kanwil DJPb Papua Barat dengan Gubernur Papua Barat Daya untuk berkoordinasi terkait Syarat Salur TKD.
Peserta Kegiatan	Fasilitasi Pertemuan Kepala Kanwil DJPb Papua Barat dengan Gubernur Papua Barat Daya

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	31 Juli 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Misi/Keterangan	Fasilitasi Pertemuan Kepala Kanwil DJPb Papua Barat dengan Gubernur Papua Barat Daya
Hasil Kegiatan	Kepala Kanwil DJPb Papua Barat dan Gubernur Papua Barat Daya berhasil diskusi/koordinasi dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	
	
	

## 34) Kegiatan 34

Nama Kegiatan	Rapat Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	31 Juli 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menghadiri undangan kegiatan rapat dalam rangka pembentukan Satgas MBG PBD.
Peserta Kegiatan	BP3OKP (Anggota & Pokja); Gubernur PBD; Pemda PBD; BGN; TNI AD; Forkopimda PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Draft Awal Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat Daya terkait Satgas Program Makan Bergizi Gratis telah tersusun.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segera selesaikan proses finalisasi dan penetapan SK Satgas Program MBG PBD.</li> <li>2. Perlu penentuan makanan lokal sebagai bagian dari Menu MBG.</li> <li>3. Perlu menyusun Perda terkait penggunaan bahan pertanian, perikanan, dan peternakan lokal.</li> <li>4. Perlu mengaktifkan Petugas Penyuluh Lapangan bagi pertanian, perikanan, dan peternakan.</li> <li>5. Perlu melakukan pemantauan terhadap Inflasi Daerah.</li> </ol>
Dokumentasi	



## 35) Kegiatan 35

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Pemilik Hak Ulayat RS Pratama Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	31 Juli 2025 di Ruang Rapat Kantor Bupati Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Mediasi dalam penyelesaian kompensasi hak atas lahan pembangunan rumah sakit bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang adil, menghindari konflik, menghormati hak masyarakat (termasuk hak ulayat), serta memastikan pembangunan fasilitas publik berlangsung dengan damai dan berkelanjutan.
Peserta Kegiatan	Pokja Produktif/Perwakilan Pokja Damai; Pemda Kab Maybrat; Masyarakat Adat; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Hasil mediasi adalah komitmen angka kompensasi yang akan diselesaikan, dokumen kesepakatan resmi, pengakuan hak masyarakat, kepastian hukum, kelancaran pembangunan, serta hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP akan terus mengawal proses penyelesaian kompensasi hak atas lahan pembangunan rumah sakit Pratama Maybrat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang adil, menghindari konflik, menghormati hak masyarakat (termasuk hak ulayat), serta memastikan

pembangunan fasilitas publik berlangsung damai dan berkelanjutan.



Dokumentasi



## 36) Kegiatan 36

Nama Kegiatan	Diskusi bersama Yayasan ASRI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	31 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk berkoordinasi terkait rencana program peningkatan kapasitas kader kesehatan di Kabupaten Tambrauw.
Peserta Kegiatan	Pokja Sehat & Cerdas; Manager dan Tim ASRI Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas)
Hasil Kegiatan	Disepakati sebuah program peningkatan kapasitas kader kesehatan di Kabupaten Tambrauw dengan berbasis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	SHEK dan kolaborasi dengan Dinas PPPA dan KB Kabupaten Tambrauw, serta penyampaian kepada Bupati Tambrauw terkait program dimaksud.
Dokumentasi	

## 37) Kegiatan 37

Nama Kegiatan	Pertemuan bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tambrauw
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	31 Juli 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah menerima permohonan pertemuan dari Kepala Dinas PPPA dan KB Kab Tambrauw untuk berkoordinasi terkait program kerja.
Peserta Kegiatan	Pokja Sehat & Cerdas; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tambrauw

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas)
Hasil Kegiatan	Pendampingan terhadap Dinas PPPA dan KB Kab Tambrau terkait program-program kerja.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	SHEK terhadap program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tambrau.
Dokumentasi	

## 2. Capaian

Selama bulan Juli 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Adapun capaian utama yang berhasil ditorehkan adalah sebagai berikut: koordinasi dengan Kementerian/lembaga pusat maupun pemerintah daerah.

### 1. Penguatan Koordinasi & SHEK

- a. Melaksanakan forum koordinasi (SHEK) dengan pemda, K/L, dan mitra strategis untuk sinkronisasi program pembangunan.
- b. Forum SHEK dengan fokus pada wilayah Kabupaten Tambrauw menjadi salah satu capaian penting, mempertemukan lintas sektor terkait percepatan pembangunan jalan di kawasan konservasi.

### 2. Pendampingan & Sinkronisasi Perencanaan Daerah

- a. Mengawal penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Papua (RIPPP & RAPPP).
- b. Terlibat aktif pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah di Kabupaten Maybrat untuk menyelaraskan visi misi kepala daerah dengan perencanaan strategis OPD.

### 3. Penguatan Tata Kelola OAP

Terlibat aktif dan memberikan rekomendasi-rekomendasi pada kegiatan Rakor Pendataan Orang Asli Papua (OAP) untuk memastikan akurasi data sebagai dasar kebijakan pembangunan.

### 4. Kegiatan Sosial & Pemberdayaan

- a. Mendukung inisiatif Gerakan Rumanona, kegiatan inspiratif bagi generasi muda dan remaja putri, serta memberikan penghargaan berupa sertifikat bagi pelopor dan peserta aktif.
- b. Menyiapkan peran dalam program nasional Koperasi Merah Putih, dengan rekomendasi penguatan kapasitas pengelola, pengembangan industri menengah, dan harmonisasi dengan program unggulan pemerintah pusat.

SHEK strategis dilakukan dengan Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pemenuhan syarat salur dan pengelolaan TKD, serta pengembangan Koperasi Merah Putih serta UMKM OAP.

### 5. Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya

Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan sebagai tim pembina, sementara Pokja Produktif berperan sebagai tim teknis/pelaksana

(Sekretaris II). Satgas ini dibentuk untuk memastikan implementasi program MBG berjalan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan lokal.

Rekomendasi umum berdasarkan rekapitulasi kegiatan dan capaian antara lain :

**1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor**

Perlu memperluas dan memperkuat Forum SHEK dengan melibatkan lebih banyak kementerian/lembaga, pemda, serta mitra strategis agar sinkronisasi program pembangunan lebih solid, khususnya terkait infrastruktur dasar di wilayah terisolasi.

**2. Konsistensi Penyelarasan Perencanaan Daerah**

Pengawasan penyusunan RPJMD dan Renstra OPD harus terus dilakukan agar seluruh dokumen daerah benar-benar berlandaskan RIPP dan RAPP, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan arah pembangunan lebih terukur.

**3. Peningkatan Tata Kelola OAP**

Diperlukan instrumen pendataan yang terintegrasi dan regulasi yang jelas, termasuk pembentukan Sekber Pendataan OAP, untuk memastikan data OAP akurat, dapat **dipertanggungjawabkan, dan menjadi dasar kebijakan afirmatif.**

**4. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM**

Program Koperasi Merah Putih perlu didukung melalui pelatihan manajemen bisnis, pengembangan rantai pasok industri menengah, serta integrasi dengan program unggulan nasional (seperti MBG) agar hasil produk lokal terserap pasar.

**5. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

Satgas MBG perlu segera menyusun mekanisme teknis pelaksanaan dan monitoring, dengan BP3OKP PBD sebagai pembina dan Pokja Produktif sebagai pelaksana, untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi petani, nelayan, serta peternak lokal.

**6. Kolaborasi dengan Aparat Pengawasan & KPK**

Penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan, termasuk serapan anggaran TKD/Otsus, perlu terus dikawal bersama KPK, DJPb, BPKP, dan APIP daerah, agar transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi bisa lebih efektif.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan, sebagai laporan realisasi sekaligus pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dengan periode waktu bulanan yakni bulan Juli tahun 2025.

Diharapkan laporan ini dapat membawa manfaat bagi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja ke depannya, serta bermanfaat bagi Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP) dan Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dalam monitoring kegiatan BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.